

# Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia

Didit Purnomo<sup>1</sup>, Diyan Utami<sup>2</sup>, Agung Slamet Sukardi<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2-3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus

\*agungslamet@iainkudus.ac.id

---

## Abstrak

**Keywords:** Poverty, Population, Inflation, GRDP, Regency/City minimum wages, HDI.

*The Human Development Index (HDI) is one of the parameters used to measure development success. HDI is measured based on the level of education, health and expenditure. Central Java Province has a lower HDI value compared to other provinces in Java and is lower than its national level and only superior to East Java. So that the sample used in this research is 35 regencies/cities in Central Java Province during 2015-2018. The type of data used is secondary data sourced from BPS Central Java and other sources related to research. The dependent variable in this study was the HDI and the independent variable consisted of poverty level, population, inflation, GRDP and regency/city minimum wages in Central Java Province. This study aims to see how the influence of the independent variables on the dependent variable using panel data analysis techniques through the best model selection test, namely the chow test and the hausman test. Where chosen the best regression results Fixed Effect Model which shows that the poverty level variable has a negative and significant effect on HDI, economic growth variables and district / city minimum wages have a positive and significant effect on HDI, while the population and inflation variables do not have a significant effect on HDI in Central Java Province.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian pada suatu negara bertujuan untuk, mensejahterakan masyarakatnya, karena kesejahteraan merupakan hak azasi yang harus diperoleh bagi setiap individu. Dengan demikian, telah menjadi tanggungjawab negara untuk mengupayakan agar masyarakatnya dapat mencapai tingkat kesejahteraan secara adil dan merata pada tingkat tertentu (Zainuddin, 2015). Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dinilai secara parsial melalui bagaimana permasalahan dapat

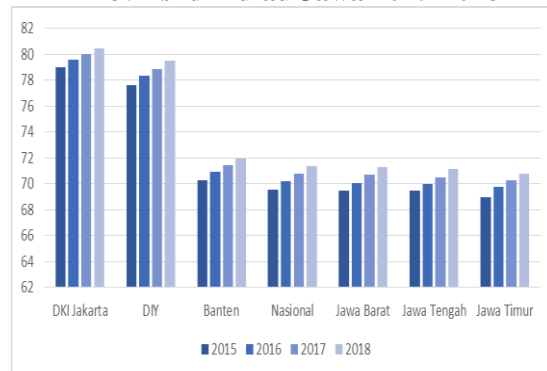
teratasi, dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat (Dwiandari dan Badera, 2018). Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Yuliani dan Saragih, 2014). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

ditentukan melalui tiga komponen dasar untuk mengukur kualitas hidup manusia yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) (Siregar, Izzah, dan Muningsgar, 2018).

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan (Dewi, 2017). Sementara itu beberapa kalangan beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan hal positif karena dapat meningkatkan perekonomian dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, namun beberapa kalangan juga beranggapan bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan (Rochaida, 2016). Inflasi yang tinggi akan menimbulkan masalah ekonomi bagi masyarakat sekaligus juga meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat menggambarkan bagaimana kualitas hidup masyarakat pada suatu negara atau daerah tersebut (Zainuddin, 2015). Inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik bagi perekonomian, karena kegiatan produksi menjadi lesu akibat terlalu rendah harga pasar dibandingkan modal yang dikeluarkan untuk melakukan produksi (Ginting, 2016). Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa (Silastri, 2017). Selain itu, upah minimum pada suatu wilayah menunjukkan standar hidup dan tingkat konsumsi penduduk, apabila upah minimum rendah maka standar hidup dan tingkat konsumsinya juga rendah (Mahihody, Engka, dan Luntungan, 2018). Keadaan tersebut akan berdampak pada kemampuan belanja para pekerja meningkat, kemudian terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR

akan dapat berdampak pada IPM (Zainuddin, 2015).

**Grafik 1**  
**Perkembangan IPM Provinsi-  
Provinsi di Pulau Jawa 2015-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 -2018

(diolah).

Berdasarkan grafik 1.1 IPM di Jawa Tengah terus meningkat, namun laju peningkatannya masih tertinggal dari provinsi-provinsi yang lain di Pulau Jawa. Meskipun tingkat IPM di Jawa Tengah lebih unggul dari Jawa Timur, namun masih di bawah nasional (BPS, 2019).

### **Kajian Literatur** **Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat statistik digunakan untuk mengukur pencapaian keseluruhan negara dalam hal sosial dan dimensi ekonomi. Sosial dan ekonomi dimensi suatu negara didasarkan pada kesehatan manusia, tingkat pendidikan dan standar pendidikan mereka hidup (Vikash, 2019). Pembangunan menurut Bappenas didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang direncanakan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan perkembangan sosial (Melliana dan Zain, 2013). Pada dasarnya pembangunan manusia memiliki empat komponen utama yaitu: *produktifitas, ekuitas, kesinambungan, pemberdayaan*, (Rustariyuni, 2014).

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk

pada suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan. Kesempatan tersebut merupakan haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Lustianah, 2016). IPM adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dampak secara fisik maupun non fisik (Melliana dan Zain, 2013). IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Ariyati, dkk. 2018; Rustariyuni, 2014). Menurut BPS, IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Sehingga nilai IPM dapat ditentukan melalui rumus berikut (Yektiningsih, 2018):

$$\sqrt[3]{\frac{IK_{\text{Kesehatan}} \times IP_{\text{Pendidikan}} \times IP_{\text{Pengeluaran}}}{100}} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

BPS menetapkan capaian IPM di suatu wilayah pada waktu tertentu dalam empat kategori atau golongan, yaitu IPM rendah apabila  $IPM < 60$ , sedang  $60 \leq IPM < 70$ , tinggi  $70 \leq IPM < 80$  dan sangat tinggi  $IPM \geq 80$  (Yetiningsih, 2018).

**Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan pada hakikatnya menunjukkan situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Didu dan Fauzi, 2016). Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dipandang sebagai orang miskin (Latumaerissa, 2015: 100). Kemiskinan jika tidak diatasi maka akan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (Prasetyoningrum, 2018).

**Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh jumlah bayi lahir (menambah jumlah penduduk), namun secara bersamaan juga akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan imigran (pendatang) akan menambah dan emigran akan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar (Silastri, 2017). Apabila penduduk terlalu padat atau penduduk jarang maupun penduduk yang tidak merata di seluruh negara, akan menimbulkan masalah-masalah kompleks (Latumaerissa, 2015: 43). Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah menjadi dua yaitu ada yang menganggap sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak (Zakaria, 2018; Rochaida, 2016). Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat (Didu dan Fauzi, 2016).

**Inflasi terhadap IPM**

Inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Ginting, 2016). Sedangkan menurut Kuncoro (2015: 45) Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut menyebabkan kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain. Selain itu, kenaikan harga yang terjadi hanya sekali, bersifat temporer atau musiman, walaupun dalam persentase yang besar tidak dapat disebut dengan inflasi. Jenis inflasi menurut sifatnya adalah: Inflasi merayap atau rendah (*creeping inflation*), Inflasi menengah (*galloping inflation*), Inflasi berat (*high inflation*), Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*) (Feriyanto, 2014:160). Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menghantui perekonomian setiap negara. Hal ini disebabkan karena dampaknya yang luas, seperti golongan masyarakat yang

berpenghasilan tetap akan menderita (berkurang kesejahteraannya) (Pangesti dan Susanto, 2018). Tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara atau daerah merupakan suatu indikator untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara atau daerah, sehingga pemerintah atau penyelenggaraan negara atau daerah harus menjalankan kebijakan yang tepat dan mengawasi laju inflasi (Zainuddin, 2015). Tingkat inflasi yang rendah akan dapat menyebabkan kelesuan perekonomian suatu negara (Ginting, 2016).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan (Silastri, 2017).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan melalui peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya (Merdekawaty, Ispriyanti, dan Sugito 2016; Ariyati, dkk. 2018). Keseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia merupakan salah satu hal yang saling berkaitan dan harus searah agar tercipta keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia (Siregar, Izzah dan Muningsar, 2018). Sedangkan menurut Zainuddin (2015), PDRB akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Dimana secara logika bila PDRB naik, maka dengan sendirinya tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik, tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan akhirnya tingkat kesejahteraan meningkat.

### **Upah Minimum terhadap IPM**

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah provinsi, Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Dalam menilai kelayakan UMR/UMP digunakan beberapa variabel yang diantaranya adalah

pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pekerja (Feriyanto, 2014:169). Upah minimum merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja (Chalid dan Yusuf, 2014). Sedangkan menurut Ningrum (2017), upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Upah yang diberikan nyatanya secara riil nilainya cukup rendah meskipun secara nominal angkanya cukup tinggi. Hal ini berakibat pada menurunnya konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **Penelitian Terdahulu**

Di Provinsi Riau selama tahun 2006-2011, Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014), dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arisman (2018), menemukan bahwa pada negara-negara ASEAN selama periode tahun 2008-2015 variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM dan tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap IPM. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model *fixed Effect*.

Pada penelitian Novita Dewi (2017) dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menemukan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau pada tahun 2014.

**2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel seperti yang telah digunakan Arisman (2018), dengan mengubah variabel independen pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran menjadi variabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota. Sehingga dapat tersusun model formula ekonometrika sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 KMS_{it} + \beta_2 LOG(PDD_{it}) + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 LOG(PDRB_{it}) + \beta_5 LOG(UMK_{it}) + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

IPM: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), KMS: Tingkat kemiskinan (persen), PDD: Jumlah penduduk (ribu jiwa), INF: Inflasi (persen), PDRB: Pertumbuhan ekonomi (miliar Rp), UMK: Upah Minimum Kabupaten/Kota (ribu Rp)

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini dianalisis dengan data panel yaitu gabungan dari data *time series* dengan *cross section*. Data *time series* pada penelitian ini ada 4 (t = 4) tahun yaitu tahun 2015-2018, dan data *cross section* dalam penelitian ini terdapat 35 Kabupaten/Kota (n = 35) di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga jumlah keseluruhan data dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 x 5 = 140 data observasi. Dimana data tersebut diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan sumber lain yang terkait.

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi Data Panel Cross Section**

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	54,4488 3	- 34,6893 9	48,1484 0
KMS	- 0,30085 8	- 0,07909 5	- 0,09299 4
Log(PDD)	-	6,74407	-

	5,92949 2	6 6,61577 8	
INF	- 0,85529 0	0,04201 7	0,04939 2
Log(PDRB)	4,34962 9	4,58582 9	4,97346 6
Log(UMK)	2,70934 1	2,14643 7	2,81637 4
R-Squared	0,71018 3	0,99792 4	0,87883 8
Adj. R-Squared	0,69936 9	0,99711 5	0,87431 7
F-Statistik	65,6722 9	1232,63 0	194,390 6
Prob. F-Statistik	0,00000 0	0,00000 0	0,00000 0

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	407,6826 33	(34,10 0)	0,000 0
Cross-section Chi-square	691,4414 96	34	0,000 0

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah).

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai p (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (<0,01), sehingga H<sub>0</sub> ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model terestimasi terbaik adalah FEM.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hausman**

Effects Test	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16,719643	5	0,0051

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah).

Dari tabel 3, terlihat nilai p (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $\chi^2$  adalah sebesar 0,0051 (<0,01), sehingga H<sub>0</sub> ditolak. Dapat disimpulkan



bahwa model terestimasi terbaik adalah model terestimasi terbaik adalah *FEM*. Dari uji Chow dan uji Hausman yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* pada tabel 5.

**Tabel 4**  
**Model Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)***

$IPM_{it} = -34,68939 - 0,079095(KMS_{it}) + 6,744076Log(PDD_{it}) + 0,042017INF_i (0,0365)**(0,1797) (0,3226) + 4,585829Log(PDRB_{it}) + 2,146437Log(UMK_{it}) (0,0002)* (0,0016)*$
$R^2 = 0,997924; DW-Stat = 2,034769; F-Stat = 1232,630; Sig. F-Stat = 0,000000$

**Keterangan:** \*Signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\*Signifikan pada  $\alpha = 0,10$ ; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik

Model dapat dikatakan eksis, apabila setidaknya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol), Uji eksistensi model adalah uji *F*. Dimana formulasi hipotesisnya adalah  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$  (koefisien regresi semua nol atau model tidak eksis);  $H_a : \beta_1 \neq 0 \mid \beta_2 \neq 0 \mid \beta_3 \neq 0 \mid \beta_4 \neq 0 \mid \beta_5 \neq 0$  (setidaknya satu koefisien tidak sama dengan nol atau model eksis).  $H_0$  diterima apabila nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F > \alpha$ ;  $H_0$  ditolak apabila nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik  $F \leq \alpha$ . Dari tabel 5, terlihat bahwa nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* sebesar 0,0000 ( $< 0,01$ ) maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model terestimasi *FEM* eksis.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi yang telah terpilih atau terbaik. Dari tabel 5 nilai  $R^2$  sebesar 0,997924, artinya 99,79% variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota. Sisanya, sebesar 0,21%

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain di luar model terestimasi.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen**

Variabel	T	Sig,t	Kriteria	Kesimpulan
KMS	-1,094277	0,0365	< 0,05	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
Log(PDD)	-2,120096	0,1797	> 0,10	Tidak Signifikan
INF	0,993965	0,3226	> 0,10	Tidak Signifikan
Log(PDRB)	3,859882	0,0002	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
UMK	3,236993	0,0016	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah.

Berdasarkan uji validitas pada Tabel 5 terlihat bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel IPM adalah variabel Tingkat Kemiskinan (KMS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sedangkan variabel Jumlah Penduduk (PDD) dan Inflasi (INF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

Variabel Tingkat Kemiskinan (KMS) memiliki koefisien regresi sebesar  $-0,079095$ , dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Tingkat Kemiskinan (KMS) naik sebesar 1 persen, maka variabel IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,079095. Sebaliknya jika apabila Tingkat Kemiskinan (KMS) turun sebesar 1 persen, maka variabel IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,079095.

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar 4,585829, dengan pola hubungan linier-logatitma. Sehingga dapat diartikan jika variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) naik sebesar 1 persen maka variabel IPM akan naik sebesar 4,585829/100 atau sebesar 0,04585829. Sebaliknya, jika variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) turun sebesar 1 persen,

maka variabel IPM turun sebesar 4,585829/100 atau sebesar 0,04585829.

Pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki koefisien sebesar 2,146437, dengan pola hubungan linier-logatitma. Sehingga dapat diartikan jika variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik sebesar 1 persen, maka IPM naik sebesar 2,146437/100 atau sebesar 0,02146437, Sebaliknya, jika variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) turun sebesar 1 persen, maka variabel IPM turun sebesar 2,146437/100 atau sebesar 0,02146437.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 5Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Dewi (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jika tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan manusia tidak mampu untuk memperoleh pendidikan maka terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah sumberdaya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbelakang atau salah guna. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) dimana tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Dimana hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), Mirza (2012) dan Tarumingkeng, Rimate dan Rotinsulu (2018), dimana tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

#### 3.2. Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangastuti (2015), dimana kepadatan penduduk bernilai positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

#### 3.3. Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2015), dimana inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena teknik analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Dimana teknik analisis yang digunakan oleh Zainuddin (2015) adalah analisis linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

#### 3.4. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Artinya setiap kenaikan atau penurunan PDRB dapat memberikan pengaruh positif secara langsung terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zainuddin (2015), dimana PDRB akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Dimana secara logika jika PDRB naik, maka dengan sendirinya tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik, tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan akhirnya tingkat kesejahteraan meningkat. Dimana hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) dimana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Abraham dan Ahmed (2015), Mirza (2012) dan Eren, Celik dan Kubat (2014), dimana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

#### 3.5. Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan UMK akan memberikan pengaruh positif secara langsung terhadap probabilitas IPM. Hal ini dikarenakan UMK merupakan gambaran dari

tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, sehingga indeks pembangunan manusianya meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) dimana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2015) dimana Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa model terpilih berdasarkan pengujian uji chow dan uji hausman adalah FEM. Hasil uji F model terpilih yaitu FEM yang telah teruji bahwa model ini eksis, dimana secara simultan variabel tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, inflasi, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan UMK berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan uji t pada signifikansi  $\alpha = 0,05$ , variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Artinya setiap kenaikan tingkat kemiskinan dapat menurunkan IPM, sebaliknya jika tingkat kemiskinan turun maka IPM akan meningkat. Sedangkan variabel PDRB dan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dimana setiap terjadi peningkatan PDRB dan UMK dapat menaikkan IPM, begitu sebaliknya jika PDRB dan UMK turun maka IPM juga akan menurun. Di sisi lain, variabel jumlah penduduk dan inflasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap IPM.

#### UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbun-bunga.

#### REFERENSI

##### Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

Abraham, Terfa Willims dan Umar Abdullahi Ahmed. (2015). Economic Growth and Human Development Index in Nigeria: An

Error Correction Model Approach. *International Journal of Administration and Development Studies, University of Maiduguri, Nigeria*, 2 (1), 239-254.

Arisman, A. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113—122.

<https://doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>

Ariyati, Nadlia dkk. (2018). Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data Evidence Empat Kabupaten di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9 (1) 92—103.

<https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.465>

Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102—117.

<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>

Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1741.

Eren, M., Çelik, A. K., & Kubat, A. (2014). Determinants of the levels of development based on the human development index: A comparison of regression models for limited dependent variables. *Review of European Studies*, 6(1), 10—22.

<https://doi.org/10.5539/res.v6n1p10>

Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p04>

Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184.

<https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>



- Pangesti, I., & Susanto, R. (2018). *Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. 5(1), 408. Retrieved from <http://www.twirpx.com/file/1146261/>.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>.
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18(1), 14. Retrieved from [http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FOR\\_UMEKONOMI/article/download/42/40](http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FOR_UMEKONOMI/article/download/42/40).
- Siregar, R., Lubis, N. I., & Muningsar, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (PM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 5(2), 106. <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1456>.
- Zainuddin. (2015). Analisis Dampak Inflasi, PDRB, dan Perkembangan Upah Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1 (1), 45-52. doi: 10.32672/jemsi.v1i1
- Yuliani, Tutik dan Saragih, Novita. (2014). Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 7 (1): 60-72. doi: 10.15294/jejak.v7i1.3843.
- Yektiningsih, Endang. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 18 (2), 32-50.
- Tarumingkeng, Rimate dan Tri Oldy Rotinsulu. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 9 (6).
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2012. *Jurnal Kependudukan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PIRAMIDA 10 (1), 45-55*.
- Merdekawaty, Rahmah, Dwi Ispriyati dan Sugito . (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). *JURNAL GAUSSIAN*, 5 (3), 525-534.
- Melliana, Ayunanda dan Ismaini Zain. (2013). Analisis Statistik Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni POMITS*, 2 (2) 237—242. doi:10.12962/j23373373520.v2i2.4844
- Mahihody, Engka, dan Antonius Y. Luntungan. (2018). Pengaruh Upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (3), 24-34
- Chalid, Nursiah dan Yusuf Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Riau*, 22 (2) 1—12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>

### **Buku**

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Jakarta. Indonesia. Diakses September 13, 2019, dari <http://www.ipm.bps.go.id>.
- Dewi, Novita. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Perumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon*, 4 (1), 870-882.

- Ginting, Ari Mulianta. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi: Studi Kasus di Indonesia Periode Tahun 2004-2014. *Kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 21 (1), 37-58.
- Kuncoro, Mudrajat. (2015). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lustianah, Meri. (2016). Pengaruh Alokasi Pro-Poor Budget terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Variabel Moderasi ditinjau dari Ekonomi Syariah. *TSARWAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (2), 85-98.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 8.
- Silastri, Novri. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fekon*, 4 (1), 105-117.
- Vikash, Verma. (2019). Human Development Index and Gross National Happiness Indices: A Conceptual Study. *Advances In Management*, 12 (1).
- Zakaria, Rizaldi. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.